



Postgraduate Bosowa University Publishing (PBUP)

Indonesian Journal of Business and Management

e-ISSN: 2460-3767 p-ISSN: 2656-6885

<https://postgraduate.universitaspbosowa.ac.id/index.php/jbm>



PENGARUH GOOD GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE DENGAN BUDAYA SIRI' SEBAGAI PEMODERASI

The Influence of Good Governance on the Analysis of Finacial Performance of the Government of Parepare City with Siri' Culture as Moderator

Imran Rosadi¹, Haeruddin Saleh², Chahyono²

¹ Magister Manajemen Universitas Universitas Bosowa

²Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: riandiandi915@gmail.com

Diterima: 08 Januari 2021/Disetujui: 02 Juni 2021

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini dalam rangka mengkaji dan menganalisis pengaruh variabel Akuntabilitas, variabel Transparansi dan variable Partisipasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare. pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang di moderasi oleh Nilai Dasar Budaya Siri' terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Parepare, Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif menggunakan metode Struktural Equation Modeling (SEM) dengan metode alternatif menggunakan Partial Least Square (PLS) melalui aplikasi Smart-PLS 3.2.9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan dan juga tidak memiliki hubungan langsung dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare, Transparansi berpengaruh signifikan dan juga memiliki hubungan secara langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare, Partisipasi berpengaruh tidak signifikan dan juga tidak memiliki hubungan langsung dengan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepar, Akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan dan juga tidak memiliki hubungan langsung dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare walaupun di Moderasi oleh Nilai-nilai dasar budaya Siri', Transparansi berpengaruh signifikan dan juga memiliki hubungan langsung dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare setelah dimoderasi Nilai-nilai dasar budaya Siri'. Partisipasi berpengaruh signifikan dan juga memiliki hubungan langsung dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare setelah dimoderasi oleh Nilai-nilai dasar budaya Siri'.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Nilai Dasar Budaya Siri' Analisis Kinerja Keuangan Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of Accountability, Transparency, and Participation on the Financial Performance of the Government of Parepare City. The influence of Accountability, Transparency and Participation which is moderated by Siri' Cultural Basic Values on the Financial Performance of the Government of Parepare City. This research is descriptive quantitative using the Structural Equation Modeling (SEM) method with an alternative method using Partial Least Square (PLS) through the Smart-PLS 3.2.9. The results of this study indicate that accountability has no significant effect on and also does not have a direct relationship with the Financial Performance of the Government of Parepare City, transparency has a significant effect on and also has a direct relationship to the Financial Performance of the Government of Parepare City, participation has no significant effect on and also does not have direct relationship with the Financial Performance of the Government of Parepare City, Accountability has no significant effect on and also has no direct relationship with the Financial Performance of the Government of Parepare City even though it is moderated by the basic values of Siri' culture, transparency has a significant effect on and also has a direct relationship with the Financial Performance of the Government of Parepare City after moderated by the basic values of Siri' culture. Participation has a significant effect on and also has a direct relationship with the Financial Performance of the Government of Parepare City after moderated by the basic values of Siri' culture.

Keywords: Accountability, Transparency, Participation, Basic Values of Siri' Culture, Regional Financial Performance

1. PENDAHULUAN

Konsep *good governance* merupakan salah satu program dalam pengelolaan sektor publik (*public sector management program*) awalnya diperkenalkan oleh *World Bank* dan *United National Development Program* (UNDP) sejak tahun 1992 dengan bentuk atau *frame* yang berbeda, dimana *world bank* lebih berorientasi pada perbaikan tata kelola pemerintahan dibidang ekonomi sementara UNDP lebih menekankan pada konsep tata pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*), kedua konsep ini pada dasarnya searah, sebab indikator yang digunakan memiliki kesamaan, dimana *world bank* menggunakan 6 (enam) dimensi pengukuran yang dijadikan indikator sementara UNDP menggunakan 9 indikator sebagai prinsip *good governance*.

UNDP (*United National Development Program*) menurut Sedarmayanti (2004: 5) menekankan pada 9 (Sembilan) prinsip *democratic governance* sebagai tata pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*) yakni partisipasi publik (*participation*), penegakan supremasi hukum (*rule of Law*), transparansi (*transparency*), bentuk kepedulian pada stakeholder/dunia usaha, berorientasi pada konsensus (*Consensus*), kesetaraan (*equity*), efektifitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*) dan visi strategis (*strategic vision*).

Konsep *good governance* dalam hal pengukuran terhadap sistem tata kelola dibidang keuangan tentunya memiliki konsep yang berbeda, walaupun tetap berada pada koridor konsep yang ditawarkan oleh *World Bank* dan UNDP. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka konsep yang digunakan mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, sementara Sedarmayanti (2009) merekomendasikan bahwa dalam mengukur sistem tata kelola keuangan ada empat prinsip yang dapat dijadikan dasar yakni akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), partisipasi publik (*participation*), dan penegakan supremasi hukum (*rule of Law*)

Hasil pengembangan dari beberapa penelitian berkaitan dengan prinsip-prinsip *good governance* khususnya prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, memiliki penjabaran yang berbeda-beda, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendra G. Putra, (2014) menjelaskan Akuntabilitas dan Transparansi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi layanan publik, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik wujud akuntabilitas dan transparansi maka semakin tinggi tingkat kinerja organisasi sektor publik. Berbeda dengan hasil penelitian dari Fanny Jitmau (2017) yang menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Sorong namun untuk prinsip transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Sorong.

Penelitian lain yang juga membahas tentang transparansi oleh Saribu (2017) mendapatkan hasil berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Hendra dan Fanny Jitmau, dimana dari hasil regresi yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa prinsip transparansi berpengaruh negatif terhadap efektifitas kinerja pegawai, dimana semakin tinggi sebuah bentuk transparansi, maka akan semakin mengurangi efektifitas kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang, dan tentunya hal tersebut akan berdampak pada kinerja pemerintah. Sementara hasil penelitian yang dikemukakan oleh Sumarni & Baso (2020), Baso dkk (2021) dan M. Azmi Insan Cemerlang (2016), memiliki pandangan yang sama yakni partisipasi partisipasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Konsep akuntabilitas, transparansi dan partisipasi juga dijadikan sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan dalam sistem tata kelola pemerintahan di Kota Parepare, hal tersebut dapat dilihat dari Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Kota Parepare Tahun 2017-2021 (RPI2JM) dimana arah kebijakan yang hendak diraih yakni penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tujuan menghasilkan bentuk layanan publik secara merata begitupun dalam hal pengembangan sistem tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan serta akuntabel, demikian pula dalam hal tata kelola keuangan

Arah kebijakan tersebut secara umum jika diukur dengan melihat capaian prestasi yang telah diraih oleh pemerintah kota Parepare dimana sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 mampu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) walaupun prestasi ini menurun di tahun 2018 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) namun hal tersebut mampu diperbaiki pada tahun 2019.

Pengakuan terhadap raihannya opini tersebut tentunya di dasarkan pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam bidang keuangan dan tentunya telah dianggap akuntabel. Akuntabilitas adalah wujud pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap keterbukaan publik yang telah diatur dalam undang-undang keterbukaan publik dengan harapan bahwa keterbukaan atau transparansi yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada tingginya partisipasi dari semua unsur baik yang ada dalam lingkup lembaga pemerintah itu sendiri dan terutama bentuk transparansi dari masyarakat.

Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan pemerintah menurut Shende dan Bennet, (2004) adalah laporan tentang keuangan pemerintah yang dipublikasikan baik secara berkala maupun dalam bentuk laporan tahunan dan telah memperoleh legalitas dari lembaga atau agen publik yang independen. Anggaran yang disusun dan telah ditetapkan untuk periode tahunan sebagai acuan

penyelenggaraan kegiatan public selanjutnya dilaporkan dengan merujuk pada akuntabilitas manajemen pelaporan anggaran sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan fiscal pemerintah dan dilakukan pengendalian secara berjenjang.

Mengukur kinerja keuangan daerah tentunya tidak hanya didasari pada nilai akuntabilitas laporan keuangan saja, namun aspek lain seperti transparansi dan partisipasi juga menjadi salah satu pilar pokok dalam mengukur sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi menurut Andrianto (2007) adalah bentuk keterbukaan yang dilakukan secara jujur kepada pemangku kepentingan (masyarakat) yang tentunya berhak untuk dapat memperoleh informasi secara terbuka dan menyeluruh atas akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah sesuai aturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut pada dasarnya telah diupayakan oleh pemerintah daerah kota Parepare melalui berbagai bentuk kegiatan seperti publikasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) melalui media online, adanya web yang dikelola oleh pemerintah daerah dimana di dalamnya menyajikan berbagai bentuk informasi termasuk aturan-aturan serta kebijakan baik yang bersifat umum maupun kebijakan berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa keterbukaan tersebut masih sangat terbatas dan mampu mencerminkan bentuk transparansi secara ideal, sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Hamid Muhammad (2007) bahwa transparansi merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi dan menjadi bagian dari pertanggung jawaban publik pemerintah kepada masyarakat. Selain itu menurut Mardiasmo (2009) informasi yang berhubungan dengan publik dapat secara langsung diperoleh dan diakses oleh pengguna informasi.

Konsep partisipasi dalam lingkup pemerintah pada dasarnya lebih berorientasi pada keterlibatan semua unsur dalam pengelolaan kebijakan mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan. Salah satu wujud partisipasi yang selama ini menjadi permasalahan dalam sebuah tata kelola pemerintahan yakni partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan dalam hal penganggaran.

Partisipasi menurut Loina Lalolo Krina (2003) mengisyaratkan bahwa semua unsur pemerintah dan masyarakat mempunyai hak untuk dapat terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada penetapan keputusan di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan. Keterlibatan. Sehingga partisipasi anggaran menurut Brownell (1982) merupakan tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran, mulai dari tingkat paling bawah yakni masyarakat sampai pada pengelola kebijakan yang ada ditingkat organisasi perangkat daerah. Partisipasi anggaran. Hal tersebut juga dipertegas oleh Chong (2002) bahwa partisipasi dalam penganggaran sebagai proses dimana pengelola anggaran

diberi kesempatan terlibat dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran.

Substansi pokok dalam mengukur kinerja keuangan dari pemerintah daerah dilakukan melalui analisis laporan keuangan yang disusun setiap periodik oleh pemerintahan daerah baik itu Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pada Bab 1, pasal 1, Ayat 5 menjelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua bentuk hak dan juga kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dimana hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang/materi termasuk didalamnya kekayaan yang dimiliki daerah dan dituangkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah tidak didasarkan pada nilai perolehan laba/keuntungan, sebab pemerintah bukan entitas bisnis yang melakukan penilaian terhadap kinerja dengan beroentasi seperti prinsip usaha nirlaba, namun kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya diukur dengan menggunakan analisis rasio kemandirian daerah, (Abdul Halim, 2007).

Fenomena yang terjadi di Kota Parepare terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari tahun 2015-2019 jika dikaji dengan menggunakan beberapa analisis rasio menunjukkan bahwa saat ini dapat dikatakan masih tergolong rendah dimana tingkat ketergantungan terhadap anggaran dari pusat masih sangat tinggi. Sementara untuk Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini sudah dapat digolongkan dalam kategori “sedang”, dimana target pencapaian PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata 5.6% dalam kurun waktu 5 Tahun (2015-2019) sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Kajian yang diuraikan oleh Asbi Amin (2019) menjelaskan bahwa terjadinya beberapa kasus pelanggaran etika dalam pengelolaan akuntansi keuangan memberikan gambaran bahwa unsur-unsur yang menjadi bagian dalam penyusunan laporan keuangan melakukan peyalahgunaan dalam praktek akuntansi dengan memanfaatkan peluang yang tertuang dalam standar akuntansi itu sendiri. Lebih lanjut diuraikan terkait dengan praktek akuntansi, dengan adanya nilai-nilai dasar dalam budaya *Siri'* dapat dijadikan sebagai alat kontrol seorang akuntan untuk dapat menghindari praktek kecurangan dalam hal ini menyusun laporan keuangan tidak sesuai dengan transaksi atau kejadian yang sebenarnya. Sehingga jika seorang Akuntan atau pelaku keuangan telah kehilangan nilai harga diri sebagai penjabaran makna *siri'* secara hakiki merupakan penjabaran dari martabat seorang manusia.

Penegasan tentang nilai *Siri'* sebagai nilai kehormatan juga diuraikan oleh Hamid Abdullah (1985) bahwa *Siri'* merupakan sebuah hal yang prinsipul dalam kehidupan masyarakat Bugis karena makna *siri'* berkonotasi dengan sebuah harga diri yang seharusnya selalu dipertahankan. *Siri'* dapat juga dikatakan sebagai

jiwa atau, harga diri, dan martabat seseorang. Mallombasi (2012) menegaskan bahwa di dalam pemaknaan *Siri'* itu sendiri dilandaskan pada nilai *Sipakatau* (Mamanusiakan manusia), *Sipakalebbi* (Saling Menghargai) dan *Sipakainge* (Saling Menasehati, menyeru pada kebaikan). Menurut Mashadi Said (2016) menguraikan bahwa hakekat dari ketiga *Nilai Siri'* (*Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalebbi*) hanya dapat ditegakkan jika dalam diri seseorang jika memiliki 3 (tiga) sikap sebagai nilai dasar seorang manusia atau biasa disebut dengan Nilai Dasar *Siri'* yakni:

Lempu, dimana dalam pemaknaannya dapat diartikan jujur, yang menurut arti harfiahnya adalah lurus, lawan kata dari kata "*jekko*" atau bengkok/curang dan segala perbuatan yang tidak terpuji. *Lempu*, juga terkadang dimaknai sebagai sebuah sikap yang ikhlas, baik, bersih diri atau adil. Sehingga dalam kehidupan *Lempu* ini sangat berlawanan dengan makna *Jekko* atau curang.

Amaccangeng (*Kepintaran/Cendekiawan/Kepandaian*), dalam *Lontara'* ditegaskan bahwa seseorang akan diberikan gelar sebagai *Toaccata* (Orang Pintar) jika mampu memahami dan bijaksana dalam memberikan pertimbangan dengan nilai kejujuran menjadi dasarnya. Sebuah *pappaseng* juga mengisyaratkan bahwa orang pandai itu mudah itu di atur dalam artian paham akan sebuah aturan namun akan sulit ditaklukkan karena mampu memikirkan sesuatu lebih dari orang lain.

Awaraningeng (Keberanian). Hanya dengan keberanian, maka prinsip *Lempu* (jujur), *Ada Tongeng* (perkataan yang benar) dan *Getteng* (sikap tegas) serta *Ammaccangeng* (kecerdasan) bisa ditegakkan dalam kehidupan sebagai individu dan warga masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif (*Descriptive Research*) dan pendekatan konfirmatori (*Confirmatory Research*). Pendekatan deskriptif menurut Sugiyono (2017:147) yakni pendekatan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sesuai kenyataan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Parepare, Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Eselon pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkup Pemerintah Kota Parepare yang terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV dengan jumlah sebanyak 532 orang. Konsep tersebut, sehingga untuk memperoleh data yang mendukung dalam

penelitian maka metode yang akan digunakan yakni: Penyebaran Kuesioner (Angket), Dokumentasi

- a) Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni pendekatan *Struktural Equation Modeling (SEM)* dengan metode alternatif menggunakan *Partial Least Square (PLS)* melalui aplikasi *Smart-PLS 3.2.9*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas memiliki pengaruh namun tidak signifikan dan juga memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare

Sesuai dengan hasil hipotesis pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh dan hubungan yang tidak langsung terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pengaruh yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pengaruh pada kualitas laporan keuangan yang dijadikan sebagai salah satu instrument dalam menghitung analisis rasio kinerja keuangan daerah. Dikatakan memiliki pengaruh dan hubungan yang tidak langsung sebab dipersepsikan dalam melakukan perhitungan analisis rasio kinerja keuangan pemerintah daerah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah dipersepsikan akuntabel sebab telah melalui pemeriksaan baik secara internal maupun melalui lembaga independen seperti BPK.

Jika mengaitkan hubungan akuntabilitas terhadap analisis kinerja keuangan pada beberapa penelitian dapat dilihat bahwa pengukuran kinerja keuangan yang dimaksudkan lebih berdasar pada penilaian terhadap kualitas laporan keuangan seperti hasil penelitian dari Fanny Jitmau., et. al (2017) dimana dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Tidak adanya pengaruh akuntabilitas dalam penelitian tersebut lebih dikarenakan pada bentuk pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sorong yang tidak sesuai dengan target yang diinginkan, hal ini dapat diartikan bahwa target yang dimaksud adalah target realisasi pencapaian dalam pelaksanaan tata kelola anggaran pemerintah

Transparansi berpengaruh secara signifikan dan memiliki hubungan secara langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Sesuai hasil analisis data berdasar pada pernyataan yang dituangkan dalam kuesioner penelitian ini, diperoleh gambaran bahwa sikap transparansi pemerintah akan mendorong kepercayaan dari masyarakat sehingga tentunya akan berdampak pada kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah, sebab dengan pola transparansi tersebut secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan untuk mengetahui dan juga sekaligus mendorong untuk melakukan pengawasan terhadap

kinerja pemerintah. Transparansi yang dimaksudkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004: 30) yakni keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi dalam hal ini masyarakat dan stakeholder selaku pemangku kepentingan. Sehingga akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penegasan tentang besarnya pengaruh transparansi terhadap analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dikemukakan oleh Ait Novatiani, dkk (2019) dalam kesimpulan penelitiannya menjelaskan bahwa Transparansi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja organisasi layanan publik dimana transparansi pada SKPD akan dapat berjalan dengan baik karena telah mampu menerapkan keterbukaan komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Peningkatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang saat ini telah berubah menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentunya akan bersinergi dengan peningkatan realisasi pendapatan yang dapat diraih oleh daerah, dimana beberapa sumber pendapatan asli daerah berada dibawah pengelolaan beberapa OPD.

Partisipasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan juga memiliki hubungan secara tidak langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

Permasalahan yang terjadi saat ini bahwa tidak semua pejabat atau pelaksana kegiatan kegiatan mampu dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak tersebut, sehingga wujud keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat dan stakeholder juga sangat terbatas, tentunya dengan kondisi seperti ini akan berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi lain yang mengakibatkan beberapa pejabat terkesan tidak berkeinginan untuk mendapatkan haknya sebagai wujud partisipasi, lebih dikarenakan jaminan hukum terhadap kebijakan yang dikelola. Maraknya kasus yang menyeret pejabat negara kepersoalan hukum menjadi dilema tersendiri bagi beberapa pejabat untuk terlibat dalam pengelolaan sebuah kegiatan. Terhadap kondisi tersebut dimana rendahnya keinginan dari beberapa unsur pejabat untuk dapat terlibat dalam sebuah pengambilan kebijakan tentunya tidak selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Loina Lalolo Krina (2003: 21) bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Walaupun kondisi tersebut tidak bersifat tetap namun akan sangat berdampak pada pola partisipasi sesuai dengan apa yang diharapkan dalam prinsip-prinsip *good governance*.

Akuntabilitas memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan juga memiliki hubungan secara tidak langsung

terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare walaupun di moderasi dengan Nilai-nilai Dasar Siri'

Penjabarannya tidak jauh berbeda dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan terkait dengan pengaruh akuntabilitas terhadap analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, Hanya saja dengan adanya nilai-nilai dasar budaya *siri'* diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar, namun berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, secara implisit bahwa nilai-nilai dasar budaya *siri'* mampu menguatkan namun tidak secara langsung namun melalui peningkatan kualitas dari laporan keuangan pemerintah. Selain itu jika dikaitkan dengan pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare, peran nilai-nilai dasar budaya *siri'* yang terdiri dari tiga unsur tidak dapat secara maksimal mempengaruhi hasil yang diperoleh dalam analisis rasio kemandirian, sebab pemberlakuan terhadap perhitungan analisis rasio bersifat pasti, dimana landasannya adalah laporan keuangan. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai dasar yang ada dalam budaya *siri'*, maka peran dominan yang dibutuhkan lebih kepada *sifat amaccangeng*, dimana dalam sebuah proses perhitungan dengan menggunakan data yang bersifat absolut maka dibutuhkan kemampuan berpikir yang lebih baik. Domain dari *Lempu* dan *Awaraniang* sangatlah kecil, data yang terpublis tentunya menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan manipulasi atau perubahan. Sikap berani tentunya juga menjadi kurang tepat jika akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Sementara terhadap Nilai-nilai dasar budaya *siri'* itu sendiri merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagaimana makna dari sebuah *pappaseng* yang diuraikan oleh Andi Palloge (2006: 46) bahwa terdapat 5 (Lima) inti pesan utama dari Kajao Lalidong untuk menjadi panutan atau tuntunan bagi seseorang sehingga mampu tetap menjaga nilai-nilai *pangadereng* dalam kehidupan, yakni:

Lempue nasibawai tau (Kejujuran yang disertai rasa takut). *Ada tongeng nasibawai tikke'* (Kebenaran kata yang disertai kewaspadaan).

Siri' nasibawai getteng (Rasa malu atau harga diri yang disertai keteguhan hati).

Awaraningeng nasibawai nyamengininnawa (Keberanian yang disertai kasih sayang).

Appesona ri Dewata Seuwae (Berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa)

Pappaseng tersebut dapat dimaknai bahwa dalam Nilai-nilai Dasar Budaya *Siri'* semua unsur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebab ketiganya memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dimana sifat *Lempu* (Kejujuran) jika tidak disertai dengan sebuah Nilai *Amaccangeng* (Kepintaran/Cendekiawan/Kepandaian) maka tidak memiliki banyak arti, begitupun jika keduanya dimiliki

oleh seseorang (*Lempu* dan *Amaccangeng*) jika tidak dilandasi sebuah sikap *Awaraningeng* (Keberanian), maka dapat dikatakan tak dapat menghasilkan sebuah hasil yang lebih baik. Sementara jika hanya sikap berani (*Awaraniangi*) yang dimiliki oleh seseorang bisa mengakibatkan kerusakan yang besar

Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan dan juga memiliki hubungan secara langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare walaupun di moderasi dengan Nilai-nilai Dasar Siri'

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dasar untuk mengetahui kondisi perkembangan kemandirian dari sebuah daerah. Hal tersebut hanya dapat diperoleh jika adanya sikap transparansi dari semua unsur khususnya pemerintah daerah dalam memberikan data sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Secara hubungan langsung antara variabel Transparansi dengan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare memiliki hubungan yang signifikan, dan ketika dimoderasi dengan *Nilai Dasar Budaya Siri'*. pengaruh yang ditunjukkan bahkan semakin kuat. Menguatnya prinsip transparansi tersebut lebih didukung dengan tiga landasan yang ada dalam nilai dasar budaya *siri'*.

Amaccangeng yang didukung oleh sebuah sikap *Lempu* (Kejujuran) dalam memberikan informasi serta ditopang oleh sikap ketegasan yang terkandung dalam makna *Awaraniangi* (Keberanian) yakni bersedia menghadapi semua kondisi (baik dan buruk) tentunya akan berdampak pada tingkat kepercayaan tinggi dari pemangku kepentingan yakni masyarakat dan para stakeholder. Transparansi yang dilandasi dengan sikap *Lempu*, *Amaccangeng* dan *Awaraniangi* tentunya akan memberikan informasi yang dilandasi dengan sebuah kebenaran dan sesuai kenyataan, sehingga pengguna informasi mampu memahami kondisi yang terjadi dalam pemerintahan. Dipahaminya kondisi yang terjadi dalam pemerintahan tentunya akan memberikan apresiasi dari masyarakat untuk mendukung semua bentuk kegiatan pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dibidang keuangan dalam hal ini melaksanakan semua bentuk kewajiban sebagai masyarakat.

Partisipasi memiliki pengaruh yang signifikan dan juga memiliki hubungan secara langsung terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare walaupun di moderasi dengan Nilai-nilai Dasar Siri'

Pengaruh yang tidak signifikan ketika Partisipasi dihubungkan secara langsung dengan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah lebih didasari oleh permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya keinginan dari beberapa unsur pejabat untuk menggunakan hak dalam penentuan atau pengambilan keputusan. Kondisi tersebut terjadi lebih dikarenakan adanya masalah ketidaknyamanan atau kejelasan akan jaminan hukum secara penuh terhadap kebijakan yang diambil. Namun dipersepsikan bahwa jika pemerintah mampu menerapkan nilai-nilai dasar budaya

siri' dalam sebuah sistem tata kelola pemerintahan khususnya berkaitan dengan anggaran maka tentunya bentuk partisipasi akan lebih meningkat, pernyataan ini dapat disimpulkan setelah dilakukan analisis data yang menunjukkan peningkatan besarnya pengaruh dari nilai partisipasi terhadap analisis kinerja keuangan pemerintah daerah setelah dikuatkan dengan nilai-nilai dasar budaya *siri'* yakni *Lempu*, *Amaccangeng* dan *Awaraniangi*. Besarnya pengaruh atau peran nilai-nilai dasar budaya *siri'* tersebut lebih dimaknai bahwa jika semua unsur mampu bersinergi dengan baik maka tentunya akan berdampak pada kemakmuran sebuah daerah. Hal tersebut sesuai dengan pemaknaan yang dituangkan dalam perbincangan antara Raja Bone dengan Kajao Laliddong (Penasehat Kerajaan) sebagaimana dikutip oleh oleh Mattulada (1985: 103-107) dalam *Lontarak LATOA*, yakni:

Tellu tanranna nasawe ase. Seuwani, komalempui Arung mangkau'e. Madduana, nakko mappemmaliwi Arung mangkau'e enrengnge to mabbicarae. Matellunna, matau seuwapi tauwe ri lalempanua

Ada tiga yang menjadi penyebab padi dapat tumbuh subur dan berhasil Pertama, apabila raja itu jujur. Kedua, apabila pantangan ditaati oleh raja beserta Tomabbicara. Ketiga, bersatu padu orang di dalam negeri.)

Iyaritu ade'e peaseriwi arajanna Arung mangkau'e, iyatona sampoi pangkaukenna toppegau bawangnge iyatona nasanresi tomadodongnge. Naiyya bicarae iyyana passarangngi assisalangenna tomangkagae. Naiyya rapange iyana passeajingngi tana masseajingnge. Nakko maarusa'ni Arumpone ade'e temmasse'ni ritu ajaranna Arung Mangkau'e masolangtoni tanae yarekko temmagettengni bicarae masolanni ritu jema'tebbe. Yarekko temmagettengni rapange iyanaritu Arumpone mancaji assisalangeng gau'enna ritu mancaji musu, musuenna ritu mancaji assiuonngeng saba' makuannanaro Arumpone narieloreng riatutui ade'e kuwaetopa bicarae enrengnge rapange sibawa wari'e

Yang dapat mengokohkan kebesaran atau kekuatan Raja yang memerintah adalah *Ade'* dan juga dapat menjadi penghalang terhadap mereka yang memiliki niat jahat bersikap hanya sesuai keinginannya juga menjadi sandaran dari mereka yang lemah. Adapun yang dimaksud dengan perkataan (bicara) merupakan sarana dalam menyelesaikan sebuah perselisihan/sengketa. Sedangkan dengan adanya *Rapang* (Pedoman/Aturan) maka dapat meningkatkan kerukunan dalam sebuah negara ibaratnya sebuah keluarga. Jika *Ade'* tidak terjaga (rusak) maka pemerintahan tidak lagi akan kokoh dan akan berakibat pada kerusakan dalam negara. Jika Perkataan (Bicara) tidak lagi ditegakkan maka kerusakan akan terjadi di masyarakat/rakyat sedangkan jika *Rapang*

(Pedoman/ Aturan) juga tidak dapat lagi ditegakkan/dipatuhi maka akan menjadi sumber persengketaan, dan dari sengketa tersebut dapat terjadi perang sehingga akan timbullah saling membunuh. Olehnya itu sangat penting untuk menjaga dan memelihara *Ade'*, begtupun bicara, demikian pula Rapang serta Wari' (Perbuatan yang mampu membedakan atau memilah dapat pula diistilahkan sebagai sebuah bentuk tata negara)

Gambaran yang dikemukakan dari *papaseng* tersebut sangatlah jelas bahwa kemakmuran terhadap sebuah negeri sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari orang-orang yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah yang baik tentunya akan berdampak pada kemakmuran dari masyarakatnya, kemakmuran hanya dapat di raih jika semua bentuk aturan mampu ditegakkan seadil-adilnya dan memberikan perlindungan kepada yang membutuhkan.

Makna dari *pappaseng* tersebut jika mampu ditegakkan tentunya akan memberikan kenyamanan dan keluwesan dari pejabat atau pelaksana anggaran dalam mempertimbangkan semua aspek dalam rangka mendukung peningkatan kemakmuran tentunya berdasar pada aturan yang berlaku. Selain itu dengan bentuk kenyamanan dan keluwesan tersebut tentunya memberikan ruang kepada semua unsur untuk mampu melakukan bebrbagai bentuk inovasi sehingga akan berimbas pada kinerja dari organisasi perangkat daerah, dengan demikian peningkatan tersebut akan bersentuhan langsung dengan peningkatan pendapatan daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akuntabilitas memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan juga tidak memiliki hubungan tidak langsung terhadap analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan karena analisis kinerja keuangan pemerintah daerah lebih berorientasi pada mengukur tingkat kemandirian daerah dengan berdasar pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tentunya telah dianggap akuntabel, sebab pertanggungjawaban tersebut telah melalui proses pemeriksaan baik melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah daerah melalui Inspektorat Daerah dan juga proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Transparansi memiliki pengaruh secara langsung dan memiliki hubungan yang signifikan terhadap analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, sebab dengan adanya wujud transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah, menjadi rujukan semua pihak untuk dapat mengukur kebijakan yang diambil oleh

pemerintah baik dalam hal kebijakan aturan perundang-undangan maupun dalam hal keuangan.

Partisipasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan juga memiliki hubungan tidak langsung terhadap analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, lebih disebabkan pada permasalahan kemampuan untuk memanfaatkan hak yang dimiliki oleh pejabat eselon yang secara tidak langsung merupakan pemegang dan pelaksana kebijakan dalam lingkup ruang kerjanya. Dampak hukum menjadi salah satu faktor terhadap adanya keraguan atau tidak berminatnya beberapa orang pejabat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas memiliki tidak pengaruh signifikan dan juga hubungan secara langsung terhadap analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dengan di moderasi oleh Nilai Dasar Budaya *Siri'*. Secara umum pada dasarnya dapat dikatakan bahwa dengan adanya nilai dasar budaya *siri'* mampu menguatkan nilai akuntabilitas tersebut, sebab dapat dilihat dari hasil analisis koefisien jalur pada penelitian ini, nilai akuntabilitas menguat dari 1,180 menjadi 1,683 sehingga dapat dikatakan bahwa nilai dasar budaya *siri'* mampu menguatkan nilai akuntabilitas awalaupun tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Nilai dasar budaya *amaccangen dan awaraniang* mampu lebih memperkuat nilai transparansi dalam pengukuran analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, sebab dengan dukungan ketiga sikap tersebut maka akan mampu melahirkan sebuah tatanan pemerintahan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Partisipasi merupakan hak yang terkadang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seseorang karena adanya ketidakpercayaan dan keraguan dari sebuah kondisi baik dalam lingkungan masyarakat terlebih dalam lingkup sebuah pemerintahan. Nilai dasar budaya *siri'* dimana di dalamnya memiliki makna yang sangat kuat menjunjung tinggi sebuah kebersamaan, dimana pemerintah, pelaku-pelaku yang menjalankan pemerintahan dan juga masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Saran-saran

Akuntabilitas secara umum tentunya memiliki dampak yang cukup besar khususnya dalam hal pertanggungjawaban pemerintah dibidang keuangan, sehingga nilai akuntabilitas tentunya tetap menjadi skala prioritas dalam meningkatkan laporan keuangan, sehingga salah satu bentuk meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan memperhatikan nilai akuntabilitas dalam pemerintahan. Transparansi adalah salah satu langkah dalam memberikan akses informasi kemasyarakat, sehingga dengan memberikan ruang yang cukup dengan menambah apa yang telah dilakukan saat ini, tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan sebuah nilai partisipasi diharapkan pemerintah mampu lebih memberikan ruang informasi yang dapat di akses oleh masyarakat. Partisipasi adalah peran dari semua apihak, tidak hanya pemerintah namun keterlibatan masyarakat semakin perlu untuk ditingkatkan, Bertambahnya keinginan dan kemauan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tentunya dapat meningkatkan kemandirian sebuah daerah dan hal ini dapat tercapai jika semua unsur mampu merasakan kenyamanan dan adanya jaminan dalam melakukan pekerjaan.

Kemandirian sebuah daerah tentunya tidak menjadi tanggungjawab dari pemerintah semata-mata, namun terlibatnya semua unsur menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi pendorong sehingga kota Parepare dapat lebih mandiri dengan jalan meningkatkan sumber-sumber penciptaan asli daerah, sehingga salah satu hal yang disarankan adalah pemerintah daerah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat mengetahui dan memahami tentang arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam hal aturan perundang-undangan maupun kebijakan dalam bidang anggaran. Nilai dasar budaya *siri'* pada dasarnya adalah jiwa dari masyarakat bugis yang mengedepankan sikap *Lempu, Amaccangeng* dan *Awaraniang*, sehingga untuk mendukung meningkatnya kinerja pejabat dan juga meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat, membangun karakter pegawai dengan mengedepankan kearifan lokal telah menjadi sebuah hal yang sangat perlu diperhatikan, olehnya itu dalam tata kelola pemerintahan sebaiknya nilai-nilai budaya lokal menjadi salah satu rujukan dalam perekrutan dan penempatan pegawai. Masyarakat adalah kelompok yang selalu berharap untuk memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya, dan masyarakat bugis secara umum sangat menghargai sebuah nilai kepercayaan terhadap tindakan dari para penentu kebijakan, olehnya itu pendekatan dengan kearifan lokal kepada masyarakat merupakan sebuah pola yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan peran masyarakat khususnya peningkatan sumber pendapatan daerah yakni pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Cliving, Gurcik (2004) , dan Anto, 2000. Metodologi Penelitian. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Collier, David A., 2003, A New Marketing Mix. Stresses Service, The Journal of Business Strategy.

Engel, James. F, Roger D. Blackwell, dan Paul W. Minniard, 2004, perilaku Konsumen, Edisi Keenam, Jilid Satu, Binarupa Aksara, Jakarta.

Husein umar, 2007, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

J. Supranto, 2001 , Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan, Untuk Menaikkan Pangsa Pasar, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Kamarudin, 2003. Faktor stimulus Pemasaran, Faktor Lingkungan, dan Fakor Individu Yang Mempengaruhi Preferensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Wilayah Samarinda. Tesis. Samarinda.

Kotler, Philip. 2005. Manajemen Pemasaran. Edisi 11. Jilid 1 dan 2. Penerbit PT INDEKS Kelompok Gramedia.

Irawan D., Handi. 2003. Indonesian Customer Satisfaction. Penerbit PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Nonci, Nurjannah, Nurmi Nonci, Harifuddin Halim, Muliani. 2019. Role of Supply Chain in Cocoa Blue Print Model Performance in National Development Program. International Journal of Supply Chain Management. Vol. 8 No. 6 (2019), pp. 198-210.

Oparilova, Adrian, 2003, The Essence of servive Marketing, prentive Hall International, United Kingdom.

Reny, A. R., Saleh, M. Y., & Sapiri, M. (2019). Pengaruh Return On Asset Dan Tobin's Q Terhadap Volume Perdagangan Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017. Indonesian Journal of Business and Management, 1(2), 09–16. <https://doi.org/10.35965/jbm.v1i2.294>

Sanyoto, 2002. Faktor-Fafor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Untuk Menabung Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Makassar. Tesis Makassar.

Simamora, Bilson. 2004. Panduan Riset Perilaku Konsumen. Cetakan 2. Penerbit PT Gramedia pustaka Utama. Jakarta.

Singarimbun, Masri dan sofian Effendi, 2006, Metode penelitian survey, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta. .

Smith, P. R, 2004, Jawaban Jitu untuk Berbagai pertanyaan pemasaran yang sulit Alih Bahasa, Endi Achmadi, penerbit Erlangga, Jakarta.

Subowo, 2001. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memiliki Kartu Plus Pada BNI Cabang Semarang. Tesis. Makassar

Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan 10. Penerbit Alfabeta, CV.Bandung

Suharsimir Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian, Rineka cipta. Jogjakarta.

Wiji Suratno. 2003. Pengaruh Kualitas Kredit, Kepuasan pelanggan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja perbankan. Tesis. Makassar

Zylstra (2020) Riset Bisnis. Edisi 1. Cetakan 1. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.